

Struktur Corporate Governace Terhadap Kesulitan Keuangan

Rifdah Riyan Dara¹, Thamrin²

1,2 Univesitas IBBI, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Rifdah Riyan Dara

E-mail : rifdahriyand@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Struktur Corporate Governance (CG) terhadap Kesulitan Keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebenaran tujuan CG dan pencapaian serta dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. CG dalam penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan komisaris independen. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Proporsi jumlah komite audit nyatanya mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia. Komunitas audit membantu dewan direksi dalam membantu mengatasi permasalahan internal perusahaan, komite audit dapat mengatasi masalah internal perusahaan dengan ukuran yang efektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 termasuk masalah kesulitan keuangan perusahaan. penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan komisaris independen juga berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit.

Kata kunci : *komite audit, komisaris independen, kesulitan keuangan.*

Abstract

This study aims to examine the effect of Corporate Governance (CG) Structure on Financial Distress. The contribution of this research is to explore the truth of CG goals and achievements and can provide solutions for conditions before and when the company experiences financial difficulties and provide things that are considered important to anticipate the possibility of financial difficulties. CG in this study uses the size of the audit committee and independent commissioners. The data analysis method used is logistic regression. The proportion of the number of audit committees is actually able to minimize or even become a solution for the financial difficulties of companies in Indonesia. The audit committee assists the board of directors in helping to resolve the company's internal problems. 55/POJK.04/2015 including the company's financial difficulties. This study shows that the audit committee has a negative effect on financial difficulties and independent commissioners also have a negative effect on financial difficulties. The proportion of independent commissioners contributed more than the proportion of audit committee ownership.

Keyword : *audit committee, independent commissioner, financial difficulties.*

PENDAHULUAN

Perusahaan mempunyai harapan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, masalah kesulitan keuangan sering di alami oleh perusahaan. Kesulitan keuangan adalah suatu kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat atau tahap kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan. Beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan misalnya PT. Krakatau Steel persero Tbk (KRAS). Perusahaan baja milik negara ini bertubi-tubi didera persoalan. Selama 7 tahun berturut-turut perusahaan ini mengalami kerugian, uang menggunung, isu PHK massal hingga mundurnya komisararis independen belum lama ini. Selain itu ada juga PT. Garuda Indonesia Persero Tbk yang belakangan ini disoroti publik penerbangan karena mengalami kerugian hingga Rp. 2,45 triliun yang menunjukkan adanya kesulitan keuangan pada perusahaan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018 menyebutkan ada 15 perusahaan yang terancam *forced delisting* atau dihapuskan dari pasar modal karena tidak dapat menjaga *going concern* perusahaan atau mengalami kesulitan keuangan.

Di era bisnis yang semakin kompetitif, suatu perusahaan dituntut untuk terus memperbaiki serta mengembangkan semua aspek bisnisnya. Pengelolaan Perusahaan adalah hal wajib yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Perusahaan dalam sistem pengelolaannya harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena dengan hal tersebut memungkinkan sebuah perusahaan mengalami kondisi sehat dan dalam kondisi yang baik secara *financial*. Lu dan Chang (2009) menyatakan bahwa jika perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi prediksi terjadinya kesulitan keuangan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan salah satunya oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan relatif mempunyai kelemahan dalam tata kelola perusahaan (Lu dan Chang, 2009). Tata kelola perusahaan yang dimiliki suatu perusahaan jika semakin baik maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegagalan perusahaan dalam mengatasi masalah kesulitan keuangan dikarenakan adanya tata kelola perusahaan yang buruk misalnya, keputusan yang tidak tepat yang diambil oleh manajemen atau kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan sehingga terdapat penggunaan dana yang kurang tepat (Nuresa, 2013).

Setelah krisis finansial di negara Asia termasuk Indonesia pada tahun 1997, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) sangat penting di Indonesia. Pembentukan komite audit merupakan salah satu hal yang penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit diharapkan efektif dan berfokus mengoptimalkan kekayaan pemegang saham dan mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen puncak (Nuresa, 2013). Komite audit merupakan strategi keberhasilan perusahaan dan upaya untuk mencapai keberhasilan sebuah perusahaan. Pada struktur tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) keterlibatan komite audit menjadi bagian yang penting untuk memberi peningkatan atas kualitas pengawasan internal dalam perusahaan, dan mampu memaksimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada pihak pemangku kepentingan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.I.5 menetapkan peraturan mengenai "Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit" dimana perusahaan yang terdaftar memiliki keanggotaan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk membentuk komite audit. Dari regulasi tersebut karakteristik yang harus dimiliki komite audit yaitu: 1) ukuran atau jumlah anggota komite audit minimal terdiri dari 3 orang yang diketuai dewan komisararis independen dan dua anggota pihak independen, 2) independensi komite

Rifdah Riyan Dara, Struktur Corporate Governace Terhadap Kesulitan Keuangan audit dinilai dari anggota komite audit yang berasal dari eksternal perusahaan dan tidak terikat hubungan dengan perusahaan, 3) frekuensi pertemuan komite audit dilakukan minimal 4 kali setahun, 4) komite audit harus memiliki minimal 1 anggota yang memiliki keahlian dalam bidang ekonomi, akuntansi dan keuangan. Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada pihak dewan komisaris perusahaan, anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dibentuk dengan tujuan melaksanakan pengawasan secara independen dalam proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, dalam proses penyelenggaraan risiko dan kontrol, serta atas proses pelaksanaan tata kelola perusahaan. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. (www.ojk.go.id)

Emrinaldi (2007) menyatakan semakin banyak jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan akan semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan karena pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan lebih mendapat pengawasan dari pihak independen. Penelitian Fathonah (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan serta komite audit berpengaruh positif terhadap kesulitan keuangan sedangkan Munawar (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kesulitan keuangan. Hasil yang tidak konsisten disebabkan tidak efektifnyafungsi pengawasan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan karena hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi pemerintah saja (Mulyadi, 2016).

Perbedaan asumsi ini menjadi dasar penelusuran dalam penelitian. Sehingga dapat mengeksplorasi kembali kebenaran tujuan *corporate governance*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara *corporate governance* yang terdiri dari komite audit dan komisaris independen terhadap kesulitan keuangan. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi untuk kondisi sebelum dan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan serta menyediakan hal-hal yang dianggap penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan Dan Teori Stewardship

Teori agensi merupakan hubungan kontrak antara principal dan agen, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal (Scott, 2015). Teori keagenan didefinisikan sebagai hubungan antara principal seperti pemegang saham dan agen. Konflik kedua pihak akan terjadi ketika terdapat upaya untuk memaksimalkan utilitas dari pihak agen. Dalam teori keagenan, pemegang saham berharap agar agen bertindak dan membuat keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik. Sebaliknya, agen tidak membuat keputusan terbaik sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam teori keagenan, agen dapat bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, dan berperilaku oportunistis. Pemberian insentif kepada agent, akan berakibat bahwa agent akan memfokuskan pada kepentingan pemilik. Teori keagenan lebih mengeksplor hubungan antara pemilik dan susunan manajemen. Pemisahan antara pemilik dan agent memungkinkan model keagenan dapat diaplikasikan untuk selaras antara tujuan manajemen dan pemilik. Teori agensi berfokus pada penyelesaian dua masalah hubungan keagenan, yaitu pertama masalah yang muncul saat tujuan agen dan prinsipal berbeda, kedua terkait dengan kesulitan keuangan yang dialami prinsipal untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan agen.

Komite Audit dan Komisaris Independen

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10 menjelaskan bahwa Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menelaah informasi keuangan, menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, menelaah pemeriksaan auditor internal, menelaah aktivitas manajemen risiko, menelaah pengaduan proses akuntansi dan laporan keuangan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan emiten serta menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten.

Hubungan antara komite audit terhadap kesulitan keuangan

Komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya agar fungsi komite audit berjalan efektif dalam menjalankan tugasnya dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas dewan direksi (Rahmat et al.,2009). Berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX tahun 2004 tentang “pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja komite audit”, komite audit sekurang-kurangnya memiliki tiga orang anggota yang dianggap sudah mampu melindungi kepentingan pemegang saham. Dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah anggota akan membuat komite audit memiliki lebih banyak sumber daya khususnya untuk menghadapi masalah yang sedang dialami perusahaan. Oleh karena itu, efektifitas komite audit akan meningkat ketika ukuran komite juga meningkat sehingga menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan

Hubungan antara komisaris independen terhadap kesulitan keuangan

Komisaris Independen mempunyai fungsi untuk mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan sekaligus penerapan good corporate governance selain dewan komisaris dalam perusahaan. Dewan komisaris independen melakukan monitoring terhadap kinerja dari dewan direksi yang dipimpin oleh direktur dan bertindak secara independen tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang ada dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan Hong-xia Lie, et al. (2008) berhasil membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berhubungan negatif dengan kesulitan keuangan. Hasil tersebut mendukung penelitian yang dilakukan Nur (2007) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif dari proporsi komisaris independen terhadap kondisi kesulitan keuangan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka kemungkinan kesulitan keuangan semakin kecil. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan

METODE PENELITIAN

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018 tanpa delisting, menggunakan mata uang rupiah dalam keuangan tahunan untuk menghindari hasil yang bias dan mengungkapkan data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sampel Penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2017). Sumber data keuangan dalam penelitian ini berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web perusahaan.

Variabel Independen

Corporate Governance pada penelitian ini diukur dengan menggunakan ukuran komite audit dan ukuran komisaris independen. Ukuran komite audit yaitu jumlah orang yang menjabat sebagai komite audit, sedangkan ukuran komisaris independen yaitu persentase Dewan Komisaris Independen dibagi dengan Jumlah dewan komisaris.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesulitan keuangan. kesulitan keuangan diukur dengan nilai *earning before tax* (EBT). Semakin besar nilai EBT maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. *Earning before tax* (EBT) digunakan karena jika rasio ini tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan aset-asetnya secara rasional sehingga laba dapat dihasilkan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (Rahmawati dan Hadiprajitno, 2015). Nilai tersebut kemudian diklasifikasikan nilai 1 jika hasil EBT 1 artinya mengalami kesulitan keuangan dan nilai 0 jika hasil EBT 0 artinya tidak mengalami kesulitan keuangan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik yang diolah dengan bantuan alat analisis SPSS, mengingat variabel kesulitan keuangan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan *dummy*. Model yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KS = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 KI + e$$

Keterangan:

KS = kesulitan keuangan

KA = Komite Audit

KI = Komisaris Independen

PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dan frekuensi kesulitan keuangan

Penelitian ini menguji hubungan *corporate governance* (CG) dalam meminimalisir atau mencegah kesulitan keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini yakni CG yang diprosikan

Rifdah Riyan Dara, Struktur Corporate Governace Terhadap Kesulitan Keuangan dengan komite audit (KA) dan komisi independen (KI). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesulitan keuangan (KS). Hasil pengujian statistik deskriptif untuk penelitian ini adalah:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	300	1,00	4,00	2,2100	,81739
KI	300	,33	1,33	,7367	,27246
Valid N (listwise)	300				

Tabel 2. Frekuensi Kesulitan Keuangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
,00	76	25,3	25,3	25,3
Valid 1,00	224	74,7	74,7	100,0
Total	300	100,0	100,0	

Penelitian ini menunjukkan hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa sebanyak 300 perusahaan yang dijadikan sampel. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ada 224 perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, setiap perusahaan tidak memenuhi standar jumlah komite audit dan komisi independen yang ditetapkan dalam POJK No.55/POJK.04/2015 yang mensyaratkan jumlah minimum KA dan KI berkisar 3 orang. Kondisi ini yang mendorong tingkat kesulitan keuangan pada seluruh perusahaan sampel menjadi tinggi.

Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan model regresi logistik untuk menguji hipotesis hubungan *corporate governance* (CG) terhadap variabel kesulitan keuangan. Model regresi logistik akan memberikan besaran nilai signifikansi yang merupakan nilai kontribusi dari masing-masing variabel CG (KA dan KI) terhadap kesulitan keuangan (KS) untuk menentukan keputusan hipotesis. Tingkat signifikan untuk keputusan hipotesis yakni dibawah 5% (<0,05). Hasil uji regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

$KS = 0,198 - 0,412 KA - 1,237 KI + \varepsilon_t$			
Variabel	Koefisien Beta	T	Signifikansi
Konstanta	0,198		
KA	0,412	1,510	0,15
KI	1,237	3,444	0,16

Hosmer and Lemeshow's	0,653
Nagelkerke R ²	0,30
Classification Plot	74,7

Keterangan : KS = Kesulitan Keuangan, KA = Komite Audit, KI = Komisaris Independen

Tabel diatas menunjukkan nilai Nagelkerke R² sebesar 0,030 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 30%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow's sebesar 0,653 yang lebih besar dari 1% juga menunjukkan bahwa model fit dengan data dan dapat digunakan. Ini juga didukung dengan *nilai classification plot* sebesar 74,7% yang menunjukkan jika model memiliki kemampuan prediksi yang layak.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan proksi pengukuran komite audit dengan nilai signifikansi yang signifikan yakni sebesar 0,15 (dibawah 5%) sehingga hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan dengan nilai koefiensi negatif artinya lomite audit berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan, artinya semakin banyak jumlah komite aduit maka akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Hasil pengujian hipotesis kedua proksi komisaris independen menunjukan nilai signifikansi berada pada kisaran 0,016 (dibawah 0,05) yang menunjukan signifikansi dari komisaris independen terhadap kesulitan keuangan dengan nilai koefiensi negatif artinya komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan dan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin menurunkan persentasi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dan 2 yang disarankan dalam penelitian ini diterima.

Hipotesis pertama mendukung asumsi dari Irmayanti dan Almuri (2020) bahwa meningkatnya efektivitas komite audit karena mempunyai sumber daya yang lebih untuk mengatasi masalah diperusahaan dengan danya jumlah efektivitas komite audit diharapkan mampu mencapai laba sesuai target perusahaan dan terhindar dari masalah kesulitan keuangan. Hipotesis kedua juga mendukung asumsi yang dikembangkan Elloumi dan Gueyie (2001) yang mengasumsikan bahwa semakin banyak proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan ke arah negatif dan mengurangi kesulitan keuangan. Hasil pengujian komite audit dan komisaris independenyang merupakan dua proksi utama dalam CG menunjukan bahwa sistem tata kelola perusahaan-perusahaan di Indonesia akan menjadi sistem tata kelola yang solutif dalam meminimalisir masalah kesulitan keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji hubungan antara *corporate governance* terhadap kesulitan keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indikator pengukuran variabel CG menggunakan dua proksi yakni komite audit (KA) dan komisaris independen (KI).

Hasil pengujian menunjukan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan kesesuaian dalam tingkat signifikansi antara kedua proksi yang digunakan dimana komite audit signifikan (H1 diterima) dan komisaris independen juga signifikan (H2 diterima). Kontribusi komite audit adalah mengetahui masalah dasar

Rifdah Riyan Dara, Struktur Corporate Governace Terhadap Kesulitan Keuangan akuntansi yang perusahaan hadapi dan memberikan saan ke dewan direksi mengenai masalah tersebut, jadi dengan bertambahnya komite audit maka semakin menurun kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dengan menerapkan efektifitas jumlah ukuran komite audit yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015. Kontribusi proporsi komisaris independen ternyata lebih berkontribusi dari proporsi kepemilikan komite audit. Proporsi jumlah komite audit nyatanya tidak mampu meminimalisir atau bahkan menjadi efek solutif dari kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia.

Secara keseluruhan maka dapat disimpulkan bahwa regulasi internal perusahaan-perusahaan dalam sistem tata kelola perusahaan dalam hal ini pembentukan proporsi komite audit maupun komisaris independen harus bersinergi dan menjadi solusi dalam mencegah dan meminimalisir adanya kemungkinan kesulitan keuangan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Emrinaldi. (2007). Analisis Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress) : Suatu Kajian Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 1.
- Elloumi, F. and Gueyie, J.P. (2001). Financial distress and corporate governance : an empirical analysis. *Corporate Governance*, 1: (1): 15-23.
- Fathonah, A. N. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 1, No. 2, 133-150.
- Hanifah, Oktita Earning dan Purwanto, Agus. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 2.
- Hong-xia Li, et all. (2008). Ownership, Independent Directors, Agency Cost and Financial Distress : Evidence from Chinese Listed Companies. *Journal of Emerald*, Vol. 8 No. 5 2008, pp. 622-636.
- Jensen, M; Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, vol.3.no 4, p 305-360.
- Lu, Y. C., & Chang, S. L. (2009). Corporate Governance and Quality of Financial Information on The Prediction Power of Financial Distress of Listed Companies in Taiwan. *International Research Journal of Finance and Economics* Vol. 02 No 32.
- Mayangsari, Lilianda Putri. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol.4 No.4.
- Mulyadi, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 1.
- Munawar, I., Firli, A., & Iradianty, A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Fianncial Distress. *E-Proceeding of Management* Vol. 5 No. 2, ISSN : 2355-9357.
- Nur DP, Emrinaldi. (2007). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress) : Suatu Kajian Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 9, No. 1.
- Nuresa, A. (2013). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress (Study Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011). *Jurnal Akuntansi: Universitas Diponegoro*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 23 Desember 2015.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroran Terbatas.

- Scott, William R. (2015). *Financial Accounting Theory*. Seventh Edition. Pearson: United State Of America.
- Sekaran, U. Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Salemba Empat : Jakarta Selatan.
- Smith, C. W., & Stulz, R. M. (1985). The determinants of firms' hedging policies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 20(4), 391–405.
- Rahmat, et al. (2009). Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed companies. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 No.7, pp. 624-638.
- Rahmawati, A. I. E. Dan Hadiprajitno P. B. (2015). Analisis rasio keuangan terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di burse efek indonesia tahun 2008-2013. *Diponegoro journal of accounting Vol. 4 No. 2 ISSN : 2337-3806*.